

**Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan
Perempuan di Kota Batam**

SKRIPSI



**Oleh
Nelly Kristina Wanti Sitorus
171010053**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan
Perempuan di Kota Batam**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Nelly Kristina Wanti Sitorus
171010053**

**PROGRAM STUDI ADMINISRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama: : Nelly Kristina Wanti Sitorus

NPM : 171010053

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, disalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 24 Januari 2023



Nelly Kristina Wanti Sitorus

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam

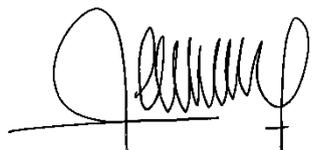
SKRIPSI

**Untuk memperoleh salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Nelly Kristina Wanti Sitorus
171010053**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 26 Januari 2023



**Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P., MPA.
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan dalam Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data peneliti ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam sudah baik akan tetapi perlu meningkatkan kinerja yang diperlukan oleh korban kekerasan perempuan. Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, peneliti menggunakan indikator dari LAN-RI yang berdasarkan lima indikator yang digunakan sebagai berikut *Input Indicator* (Masukan), *Output Indicator* (Keluaran), *Outcome Indicator* (Hasil), *Benefit Indicator* (Manfaat) dan *Impact Indicator* (Dampak) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam, Kekerasan pada perempuan semakin bertambah dengan adanya berita dan berita kabar, adanya penyuluhan dan sosialisasi dalam mencegah kekerasan pada perempuan di Kota Batam, mendapat fasilitas berupa dukungan spiritual, pendampingan, merasa di lindungi, dan menuntut haknya, dan Dampak positif dari pencegahan kekerasan pada perempuan membuat korban merasa aman dengan fasilitas yang di berikan dinas dari psikolog dan pendampingan.

Kata kunci: Strategi, mencegah, kekerasan perempuan.

ABSTRACT

Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination and Violence against Women. The purpose of this research is to describe in the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City and to analyze the inhibiting factors in the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City the type of research method used is descriptive research method with a qualitative approach using interview, observation, and documentation data collection techniques. The data sources of this researcher consist of primary data and secondary data. The results showed that the Strategy of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Women's Violence in Batam City was good but needed to improve the performance required by victims of violence against women. Based on the conclusions and results of the study, researchers used indicators from LAN-RI which were based on five indicators used as follows: Input Indicator (Input), Output Indicator (Output), Outcome Indicator (Results), Benefit Indicator (Benefit) and Impact Indicator (Impact) namely improving existing facilities and infrastructure at the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Preventing Violence against Women in Batam City, Violence against women is increasing with news and news reports, counseling and socialization in preventing violence against women in Batam. Batam City, received facilities in the form of spiritual support, mentoring, felt protected, and demanded their rights, and the positive impact of preventing violence against women made victims feel safe with the facilities provided by the service from psychologists and assistance.

Keywords: Strategy, prevent, Tax on violence against women.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih setia menyertai dan memberi Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis bersedia menerima segala bentuk kritik dan saran. Dengan segala kekurangan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, pendapat serta dorongan kata semangat dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Ibu Lubna Salsabila, S.IP., M.I.P.,MPA. selaku dosen pembimbing skripsi saya pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen khususnya pada Program Studi Administrasi Negara yang sudah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan;
5. Orang tua dan seluruh keluarga besar yang telah mendoakan serta mensupport saya lahir dan batin;

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, untuk setiap doa dan dukungan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua.

Batam, 23 Januari 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nelly Kristina Wanti Sitorus', written on a light-colored background.

Nelly Kristina Wanti Sitorus



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian	7
BAB II Kajian Pustaka	8
2.1 Konsep Dasar	8
2.1.1 Pengertian Strategi.....	8
2.1.2 Pengukuran indikator Kinerja.....	9
2.1.3 Konsep Kekerasan Perempuan	10
2.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.3 Kerangka Pemikiran	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Sifat Penelitian.....	23
3.3 Lokasi dan Peride Penelitian	23
3.4 Sumber Data	24
3.5 Metode Pengumpulan Data	25
3.6 Metode Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Gambaran Umum	29
4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.....	29
4.1.2 Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.....	30
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.....	31
4.1.4 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	33
4.2 Hasil Penelitian.....	35
4.2.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.....	35
4.3 Pembahasan	41

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	43
5.1 Simpulan.....	43
5.2 Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendukung Penelitian

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4. Surat Balasan Dinas

Lampiran 5. LOA dan Link

Lampiran 6. Hasil Turnitin Skripsi

Lampiran 6. Hasil Turnitin Jurnal

DAFTAR TABEL

	Halaman
Gambar 1.1 _Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2017-2021..	
.....	2
Gambar 1.2 _Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Batam Pada Tahun 2017-2021	
.....	3
Gambar 3.1 _Komponen analisis data (<i>Interactive model</i>)	27
Gambar 4.1 _Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 _Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 _Kerangka Pemikiran.....	22
Tabel 3.1 _Periode Penelitian	24
Tabel 3.2 _Data Primer	25
Tabel 4.1 Pegawai Berdasarkan Golongan	33
Tabel 4.2 Daftar Inventaris Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	34
Tabel 4.4 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas P3APPKB Kota Batam.....	34



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika kependudukan yang ada di negara Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia memiliki luas daratan sebesar 1,92 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk Indonesia pada September 2020 sebanyak 270,20 juta jiwa.

Hasil Sensus Penduduk 2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun. Catatan sensus penduduk ini juga tidak terlalu baik karena jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga seluruh masyarakat Indonesia tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah.

Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan mengendalikan kenaikan penduduk tersebut, jika tidak terkendali bisa menjadi ancaman berat bagi pertumbuhan kota. Seperti yang di ungkapkan malthus (Priyono & Ismail, 2012), bahwa pertumbuhan semakin bertambah memeberikan tekanan yang berat, dan jika tidak tercegah maka mengakibatkan kemiskinan yang menghasilkan kesengsaraan dan kelaparan. Pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kebutuhan masyarakat maupun ekonomi.

Selain mempengaruhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, kekerasan terhadap wanita menjadi budaya sehingga sangat mudah seseorang melakukan kekerasan, tanpa alasan yang berarti. Seolah-olah kekerasan menjadi cara penyelesaian masalah tersebut (Fadlurrahman, 2014). Perempuan mempunyai

posisi lemah yang mengakibatkan rentannya dalam kasus kekerasan yang sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Angka kekerasan yang masih tinggi setiap tahun di alami perempuan yang ada di Indonesia, yang terdapat dalam Data Komisi Nasional Perempuan (Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Kasus Kekerasan Perempuan di Indonesia Pada Tahun 2017-2021



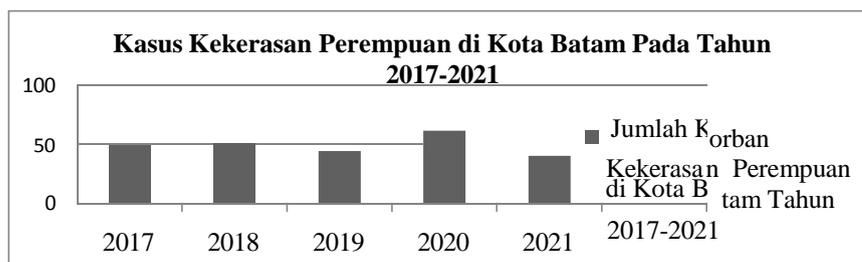
(Sumber: Komisi Nasional Perempuan, 2021)

Jumlah kasus kekerasan perempuan sejak 5 Tahun. Kekerasan perempuan tahun 2020 menurun menjadi 31,5 persen dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan masa pandemik, korban hanya diam atau hanya mengadu pada keluarga, masalah literasi teknologi dan layanan aduan yang belum siap pada masa pandemik (Sistem *online*). Tahun 2019 ada 61 kasus dan tahun 2020 menjadi 68 kasus pada setiap lembaga, sehingga pengembalian kuesioner sama dengan tahun yang lalu, sehingga adanya peningkatan 10 persen atau 1700 an kekerasan perempuan (Komisi Nasional Perempuan, 2021).

Angka kekerasan perempuan di Kota Batam meningkat secara fluktuasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena kekerasan perempuan bukanlah hal yang sepele karena membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan, baik dari pemerintah, lembaga perlindungan perempuan maupun masyarakat. Data

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batam dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.2 Kasus Kekerasan Perempuan di Kota Batam Pada Tahun 2017-2021



(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, 2022)

Pada tahun 2017 tercatat 48 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 38 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sepuluh kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 54 kasus kekerasan perempuan, diantaranya empat puluh tujuh kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tujuh kasus perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2019 jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 44 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 43 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan satu kasus perdagangan perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2020 jumlah tersebut meningkat lagi sebanyak 41 kasus kekerasan perempuan, diantaranya dua kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan 39 kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*). Pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun sebanyak 40 kasus kekerasan perempuan, diantaranya 31 kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan sembilan

kasus Perdagangan Perempuan (*women trafficking*).

Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kedudukan sama yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar pasal 27, Perempuan yang mengalami diskriminasi seharusnya tidak ada, mengenai ratifikasi konvensi yang ada kaitannya dengan penghapusan diskriminasi pada perempuan (Konvensi penghapusan bentuk deklarasi pada perempuan) yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 pasal 15 Tahun 1984. Negara seharusnya mengklaim seluruh warga negara masing-masing pada semua bentuk ancaman kekerasan, atau kekerasan, komitmen kehadiran kemanusiaan, dan penyiksaan. Selain itu, Pemerintah juga meratifikasi Undang-Undang dan kebijakandalam pengolahan kekerasan dan pencegahan (Sopianti, 2022).

Pemerintah Kota Batam menyadari perlunya sebuah pembentukan institusi yang khusus menangani perempuan korban kekerasan. Untuk merespon kebutuhan tersebut Pemerintah Kota Batam memerlukan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam dengan meningkatkan strategi, untuk dapat mewujudkan strategi yang kualitas. Untuk pencegahan ini, yang harus diwujudkan adalah mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan meningkatkan sinergitas masyarakat.

Pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) perubahan adalah program,

kebijakan, sasaran, tujuan, visi, dan misi yang berproses orientasi pada hasil dalam waktu tertentu dengan antisipasi masa depan yang berkembang, dengan mengharapkan pihak yang terkait dalam program Dinas tersebut. Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan ini sudah berjalan dengan baik, Namun angka kekerasan pada perempuan masih tinggi dan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Peningkatan bisa dilihat dari kualitas bukan hanya kuantitas saja yaitu jumlah kasus kekerasan perempuan.

Menurut data (TribunBatam.id 2021) yang di himpun hingga akhir tahun 2021, beberapa catatan menunjukkan angka kekerasan antara lain, kekerasan seksual tiga puluh tiga kasus, dengan jumlah korban dewasa sembilan. Selanjutnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tiga puluh sembilan kasus dengan jumlah korban satu orang anak-anak dan tiga puluh delapan orang dewasa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sembilan kasus dengan jumlah korban tiga anak dan sembilan dewasa, eksploitasi ekonomi tujuh kasus dengan jumlah korban delapan belas anak dan lima dewasa. Lalu kekerasan fisik enam puluh tiga kasus dengan jumlah korban enam puluh anak dan tiga dewasa, penelantaran tiga kasus dengan jumlah korban empat anak, PMI Bermasalah (*Undocument* korban) dua puluh dua kasus dengan jumlah korban dua puluh dua orang dewasa. dalam tiga tahun terakhir ada banyak kasus kekerasan pada perempuan.. Jenis kekerasan yang di alami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik, selain itu ada kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Terkait peningkatan tren kekerasan. Sementara untuk perempuan dan anak korban kekerasan telah di berikan penguatan rehabilitasi (Batamnews.co.id 2021).

Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan perempuan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan berita (Kepripedia.com, 2021), jika dibanding enam kabupaten/kota lain. Persentase tertinggi ada di Kota Batam dan juga sering fluktuasi karena dari jumlah penduduk di daerah masing-masing, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 diantaranya Batam yang di dominasi bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana pemerintah memecahkan persoalan kekerasan pada perempuan di kota Batam. Maka dari itu peneliti mengangkat judul **“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dalam Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini

A. Manfaat Teoritis

a. Untuk Mahasiswa Administrasi Negara

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, program studi Ilmu Administrasi Negara khususnya mata kuliah Administrasi Publik dan Pengantar Ilmu Administrasi Negara.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi, dapat memberikan wawasan tentang pemahaman akademik, literatur, dan bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama sebagai bahan referensi sebagai informasi, sumber bacaan kedepannya dan berkontribusi di bidang pendidikan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kota Batam dan pihak-pihak yang bersangkutan guna mengambil langkah yang tepat dalam proses Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi merupakan konsep yang sudah ada sejak lama yang berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang artinya seni atau ilmu jenderal (*general*), strategi disebut sebagai program umum dan luas dalam tercapinya sasaran organisasi yang dibuat sebagai respon terhadap lingkungan organisasi. (Wijayanto, 2012). Ahmad A.Adnanputra yang merupakan pakar humas berdasarkan paparan ahli berisi judul *PR Strategy* dalam strategi adalah bagian terpadu dan rencana selanjutnya dalam langkah-langkah sudah direncanakan disebut program kerja (Sari, 2012a). Menurut (Effendy), yang dikutip dalam jurnal (Khalida & Dompok, 2019) Strategi merupakan proses dalam perencanaan dan manajemen untuk pencapaian satu tujuan. Pencapaian harus memiliki cara yang disesuaikan pada tujuan proses.

Selanjutnya, komponen-komponen yang membentuk strategi dapat mempengaruhi unsur-unsur dalam visi, tujuan, sasaran, kondisi dan lingkungan yang membentuk pola budaya perusahaan:

1. Elemen kebijakan umum, sistem ekonomi dan teknologi dikendalikan oleh organisasi, dan budaya yang digunakan dalam perusahaan dan institusi itu sendiri.
2. Sumber daya manusia, yang digunakan, perencanaan dan program

jangka panjang atau jangka pendek, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan sistem organisasi yang bergantung pada misi perusahaan (Sari, 2012).

Dengan demikian rencana strategis adalah suatu konsep perencanaan yang tergantung pada misi perusahaan, dapat digunakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang yang bersifat strategis dan diterapkan dengan baik dalam mengembangkan kegiatan usaha dan mendorong proses instansi pemerintah, baik swasta dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

2.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran strategi dalam kinerja utama atau disebut IKU (Indikator Kinerja Utama), jika membaca SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), kita akan melihat adanya IKU (Indikator Kinerja Utama) yang disebut juga KPIs (*Key Performance Indicators*). Alat yang digunakan dalam mengukur dan memecahkan hal yang sulit untuk diukur dan masalah tertentu.

Manfaat KPIs atau IKU (Indikator Kinerja Utama) pada instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Keberhasilan organisasi pada pemerintah mendapatkan ukuran dan digunakan dalam memperbaiki kinerja dan peningkatan kualitas serta organisasi perangkat dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dalam instansi pemerintah.
- b. Alat pendukung dalam keputusan pemimpin pemerintah dalam mendapatkan informasi dan data kinerja.

Indikator (ukuran) yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Pemerintahan menurut LAN-RI dalam buku Teori Administrasi publik sebagai

berikut:

- a. *Input* (Masukan) adalah mengenai Sumber Daya Manusia dapat menghasilkan hasil dan juga keluaran yang secara langsung bekerja. Contohnya yaitu kuantitas, kualitas dan kehematan
- b. *Output* (Keluaran) adalah hasil yang didapatkan dari produk secara langsung, baik secara fisik maupun nonfisik yang menghasilkan dan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah di rencanakan.
- c. *Outcome* (Hasil) adalah dampak yang di hasilkan dari hasil nyata, seperti ekonomi yang bertumbuh, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan lainnya.
- d. *Benefit* adalah keuntungan serta aspek positif lainnya yang dapat dihasilkan oleh program dan kegiatan bersangkutan bagi masyarakat dengan berfungsinya keluaran secara optimal.
- e. *Impact Indicator* (Dampak) adalah pengaruh positif dan negatif yang dapat muncul bagi pembangunan dan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Konsep Kekerasan Perempuan

Konsep kekerasan terhadap perempuan tidak jauh berbeda antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Namun definisi dan bentuk kekerasan terhadap perempuan (*women against women violence*) yang paling banyak dianut oleh berbagai negara di dunia umumnya mengacu pada definisi dari *United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women* tahun 1993, khususnya dalam pasal-pasal 1 dan 2 seperti berikut ini (Fadlurrahman, 2014: 164-165):

- A. Pasal 1. Istilah “kekerasan pada perempuan” artinya kekerasan yang dalam tindakannya basis gender yang berakibat atau mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan perempuan secara seksual, fisik, tindakan paksaan, ancaman, paksaan kewenangan, baik dalam kehidupan pribadi dan di depan umum.
- B. Pasal 2. Kekerasan terhadap perempuan adalah dipahami untuk mencakup, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut yaitu
- a. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual, terjadi pada keluarga termasuk pelecehan seksual dan pemukulan perempuan dalam rumah tangga, pemerkosaan, mas kawin kekerasan, praktik tradisional dan mutilasi yang sudah berbahaya, bukan pasangan kekerasan dan eksploitasi.
 - b. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual, terjadi pada masyarakat umum, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, intimidasi seksual di lembaga pendidikan, tempat kerja dan tempat lainnya, prostitusi paksa dan perdagangan perempuan.
 - c. Kekerasan psikologis, fisik dan seksual yang di biarkan begitu saja oleh negara.

Kekerasan atau *violence* yang dihadapi perempuan dapat berupa kekerasan fisik dan non fisik. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan muncul sebagai akibat dari peran yang berbeda (Kurniawan & Hogandria, 2020:32). Kata kekerasan merupakan terjemahan dari kata kekerasan yang berarti penyerangan terhadap keutuhan fisik atau mental seseorang . Pelaku kekerasan terhadap perempuan dapat berupa individu seperti dalam rumah tangga, masyarakat, atau negara. Salah satu jenis kekerasan yang dihadapi perempuan bersumber dari

persepsi gender (Indrawati et al., 2018:144).

Berikut bentuk kekerasan secara fisik telah di alami perempuan yaitu:

- a. Pemerkosaan, termasuk juga perkawinan;
- b. Pelecehan seksual; dan
- c. Kekerasan yang di alami perempuan dalam kehidupan rumah tangga
- d. Perempuan yang mengalami kekerasan secara non fisik, yaitu:
- e. Prostitusi/pelacuran dimana seseorang atau sekelompok orang diuntungkan;
- f. Perempuan yang di eksploitasi
- g. Tubuh perempuan sebagai objek kepentingan atau pornografi; dan
- h. Program Keluarga Berencana memiliki tujuan dalam pengendalian jumlah penduduk, sasaran program pada perempuan. Kontrasepsi yang sedikit di tujukan pada pria.

Tindakan kekerasan memberikan dampak yang cukup serius bagi korban atau perempuan, misalnya terhadap kesehatan fisik dapat berupa tertular penyakit menular seksual, memar, luka luar dan dalam, gangguan kesehatan kronis (Tambajong et al., 2021:58). Selain itu juga berpengaruh terhadap kejiwaan korban berupa depresi, ketakutan, harga diri rendah, disfungsi seksual, gangguan stres pasca trauma dan dampak fatal bunuh diri, membunuh atau melukai pelaku, kematian karena aborsi dan juga berdampak pada lingkungan sosial. Disamping itu dampak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu dampak medis, seperti memerlukan biaya pengobatan. Dampak emosional seperti depresi, penyalahan obat-obatan dan alkohol, stress pasca trauma, rendahnya kepercayaan

diri (Widia et al., 2020:21).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelii	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Ulyta Armania, Rumzi Samin, dan Edy Akhyary Tahun 2021	Implementasi Program Cek Dare Kepri Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Dilihat dari dimensi lingkungan dimana kebijakan yang dilaksanakan dari lingkungan sosial belum maksimal karena angka kekerasan di Kepulauan riau semakin meningkat setiap tahunnya. Kesimpulannya adalah pelaksanaan program ini belum dapat berjalan secara optimal.

2	Lalu Fadlurrahman Tahun 2014	Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan.	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Kinerja pelaksanaan P2TPA RDU efektif dalam mencapai tujuannya, karena dari hasil penilaian keluaran program yaitu akses, cakupan, pelayanan dan kesesuaian program dengan kebutuhan, pelaksanaannya efektif. Namun, P2TPA RDU masih memiliki kekurangan dalam hal sosialisasi, khususnya bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda terdepan penanganan perempuan korban kekerasan.
---	------------------------------------	--	--	--

3	Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda AF Tahun 2018	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penanganan korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan oleh pemerintah dari awal pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil penilaian dari petugas, selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan korban.
4	Khalida dan Timbul Dompok Tahun 2019	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Bulang Kecamatan Bulang	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Strategi yang digunakan Puskesmas Bulang dalam meningkatkan mutu pelayanan rawat inap adalah: (A) Strategi SO Strength-Opportunity yaitu Meningkatkan mutu pelayanan rawat inap Meningkatkan mutu dan

				<p>ketersediaan ketersediaan obat dan peningkatan kerjasama antar karyawan. (B) Threat force, Meningkatkan kerjasama antara Puskesmas Bulang dengan masyarakat. (C) Strategi WO Weakness- Opportunity yaitu menjadikan SDM yang berkualitas sesuai dengan profesinya dan meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas. (D) Weakness- Threat Strategi WT, Meningkatkan, sesuai dengan bidangnya guna memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat Kecamatan Bulang. Berdasarkan hasil</p>
--	--	--	--	--

				tersebut diharapkan Puskesmas Bulang dapat meningkatkan mutu pelayanan khususnya pada pelayanan rawat inap.
5	Yuliani Sopianti Tahun 2022	Implementasi Peran Dp3ap2kb Provinsi Ntb Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Perempuan Dewasa	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	DP3AP2KB Provinsi NTB dalam pelaksanaan atau pelaksanaannya cukup efektif. Dilihat dari indikatornya. Indikator kepentingan yang berpengaruh adalah pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan perempuan karena perempuan adalah tiang negara yang akan melahirkan generasi penerus. kemudian dari segi manfaat pelaksanaannya yaitu apabila berhasil membantu maka pelaksanaan program

				berjalan sesuai rencana dan visi misi dapat terlaksana atau berjalan sesuai target.
6	Hesty Tambajong1, Hubertus Oja, dan Adolfin Pakage Tahun 2021	Strategi Dinas Dalam Memberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kelurahan Kelapa Lima	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pemberdayaan perempuan korban kekerasan adalah dengan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di Desa Kelapa Lima. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke mempunyai masalah pada pemberdayaan perempuan

				yaitu anggaran dan kurangnya kerjasama dengan pihak swasta, terbatasnya sumber daya manusia, lembaga pemberdayaan maupun instansi lain.
7	I Ketut Widia, Ni Made Puspasutari Ujianti, dan I Wayan Arthanaya Tahun 2020	Pemberdayaan Pengurus Desa Adat Desa Tuwed Sebagai Paralegal Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan	Focus Group Discussions dan partisipasi terlibat dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak dan perempuan	Isu kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif industri pariwisata menjadi perhatian dan menentukan jumlah wisatawan atau orang yang mengunjungi suatu negara. Banyak negara yang gagal promosikan potensi destinasi pariwisatanya karena isu kekerasan terhadap perempuan. Dunia pariwisata juga rentan dan sensitif pada isu-isu. Bali sebagai destinasi wisata

				<p>kelas dunia, berulang kali diterpa isu. Berbagai persoalan melanda Bali antara lain kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga secara regional Bali menderita kerugian devisa kurang lebih 3 triliun per bulan.</p>
8	<p>Rudi Kurniawan dan Cut Dilla Hogandria Tahun 2020</p>	<p>Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak</p>	<p>teknik penentuan informan yang ditentukan secara purposive sampling</p>	<p>Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Banda Aceh belum berjalan secara maksimal karena belum adanya ruang khusus penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini tentu saja sangat mempengaruhi</p>

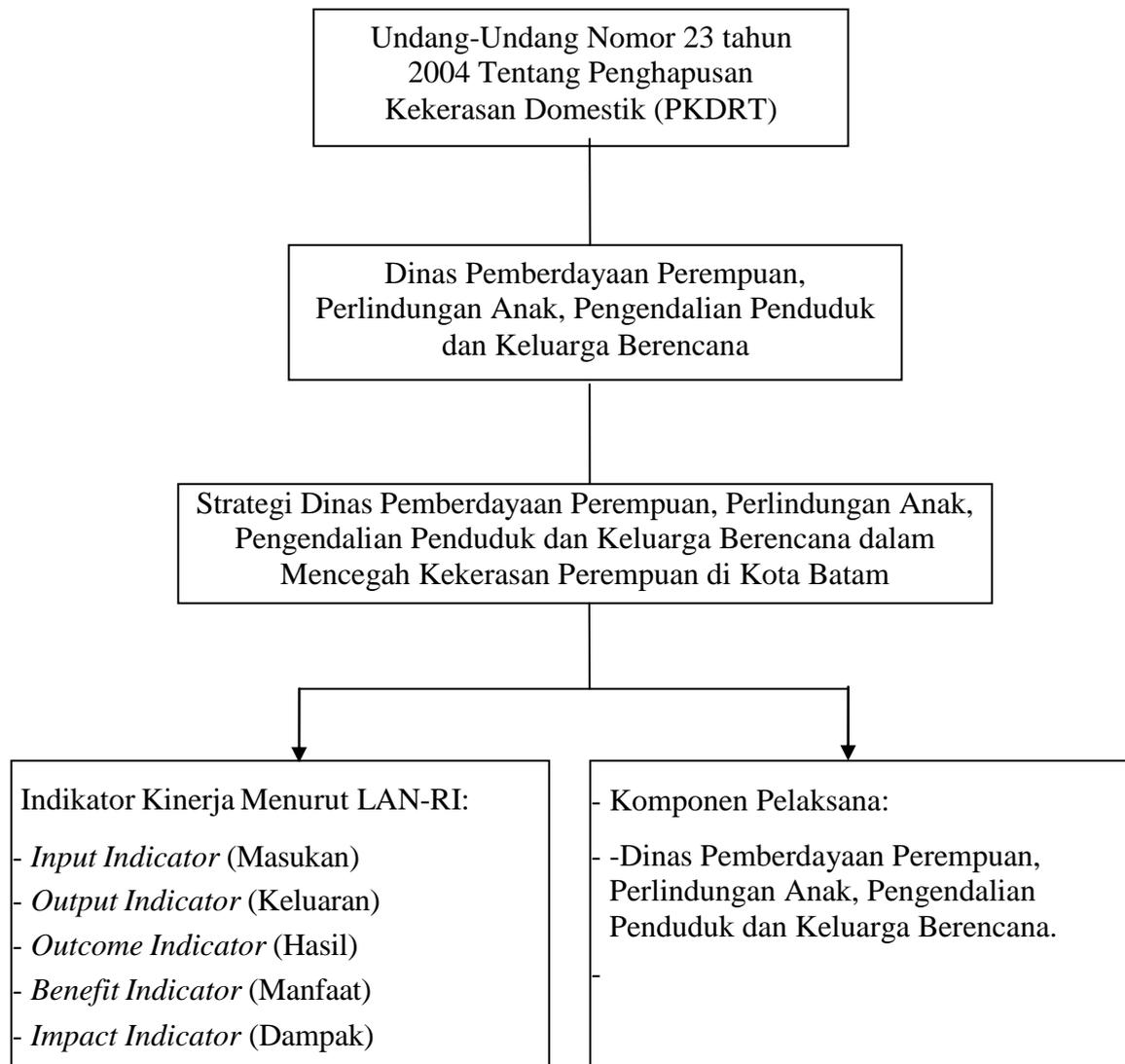
				proses penyidikan. menangkap pelaku kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (Pasolong, 2016), kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai keterkaitan teori-teori yang saling berhubungan dan dengan berbagai penyebab yang telah diidentifikasi dalam masalah yang mendesak. Kerangka kerja yang baik dalam penelitian akan menggambarkan hubungan antar variabel. Sehingga secara teoritis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat diperjelas dan dirumuskan dalam susunan paradigma penelitian. Dengan demikian, setiap paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

(Data Peneliti, 2022)





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut (R Walter & Meredith) yang dikutip oleh (Sugiyono, 2015:7-8) mendefinisikan metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada sebuah filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena terdapat hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif.

3.2 Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian pengembangan, artinya bentuk penelitian yang memberikan penambahan variabel, indikator, objek penelitian, dan/atau alat analisis yang baru dan atau dalam kualitatif bersifat deskriptif dan studi kasus.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

a. Lokasi

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ialah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada di Jl.Raja Isa No.17, Gedung Dinas Bersama Pemko Batam LT. III Batam Center.

b. Periode penelitian

Tabel 3.1 Periode Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																							
		Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022							
1	Studi Pustaka	■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal			■	■																				
3	Pengumpulan Data			■	■	■	■																		
4	Pengolahan Data						■	■	■	■															
5	Analisa Hasil Penelitian										■	■	■	■											
6	Penyusunan Laporan														■	■									
7	Penyerahan Laporan																	■	■	■	■	■			
8	Sidang Hasil																				■	■	■	■	

3.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber langsung, yaitu informasi atau sumber dari tangan pertama. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung yaitu sumbernya, tetapi dari pihak ketiga (Sugiyono, 2017:193).

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas maka ditetapkanlah informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Tabel 3.2 Data Primer

No	Nama	Jabatan
1	Fisca Anggiana, SE.	Kabid Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan
2	Dedy Suryadi, AKS, MH.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
3	Lina	Masyarakat
4	Joko	Masyarakat

(Hasil Wawancara, 2022)

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung yaitu sumbernya, tetapi dari pihak ketiga. Peneliti. Data yang diperoleh dari jurnal, buku, penelitian terdahulu, dari website Dinas dan dokumen-dokumen penting dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian dalam buku (Sugiyono, 2015:224-225), karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelii tidak akan mendapatkan data yang memenuhi strandar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data secara umum ada empat yaitu:

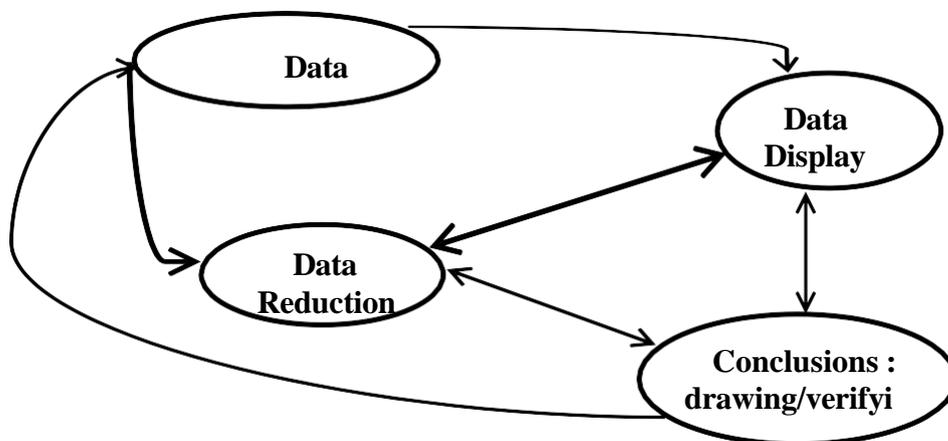
- a. Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan dengan bekerja berdasarkan data dan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data tentang informasi yang di peroleh, tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.
- c. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang
- d. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data.dan sumber data yang telah ada.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam buku (sugiyono, 2015:245) menyatakan “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung rus sampai penulisan hasil penelitian”.

Miles dan Huberman mengemukakan dalam aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data jenuh.

Gambar 3.1 Komponen analisis data (*Interactive model*)



(Sumber: Sugiyono, 2015:247)

Aktifitas analisis data, yaitu reduksi Data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Meringkas dan memilih poin-poin utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga gambarannya juga jelas dan peneliti memudahkan pengumpulan data dan apa yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Dalam penelitian ini penyajian data bersifat naratif yang di peroleh peneliti berkaitan dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

